

**PENGARUH SAP DAN SPI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN
SEBAGAI PEMODERASI**

Layali Ihyani, Lilik Handajani, Endar Pituringsih

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords: *Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Refocusing, Reallocating the Budget, The Quality of Financial Reports*

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, *Refocusing*, Realokasi Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan

Corresponding author:

Layali Ihyani
lalahyani@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effect of government accounting standards (SAP) and internal control systems (SPI) on the quality of regional financial reports by refocusing and reallocating budgets as moderators. The population of this research are employees in the accounting department at 43 regional government organizations (OPD) of the West Lombok Regency Government. The data analysis tool uses an interaction test. The results of the study state that partially, SAP and SPI have a significant positive effect on the quality of financial reports. Then, refocusing does not strengthen the influence of SAP and SPI on the quality of financial reports. Furthermore, budget reallocation strengthens the influence of SAP on the quality of financial reports. However, budget reallocation does not strengthen the influence of SPI on the quality of financial reports. The implication of this research is that the variables in this study can be considered by the compilers of financial statements in improving the quality of the reports produced. In addition, the implications of this research can also be used as material for consideration of improving the applicable regulations related to the policy of refocusing and reallocating the budget so that needs that are considered less urgent can be refocused so that the two policies can help prepare financial statements to implement adequate SAP and SPI.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai pemoderasi. Populasi penelitian adalah pegawai pada bagian akuntansi pada 43 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Alat analisis data menggunakan uji interaksi. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, SAP dan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, *refocusing* tidak memperkuat pengaruh SAP dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, realokasi anggaran memperkuat pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, realokasi anggaran tidak memperkuat pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah variabel dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan. Selain itu, implikasi penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan peraturan yang berlaku terkait kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran agar kebutuhan yang dinilai kurang mendesak dapat di *refocusing* kembali sehingga kedua kebijakan tersebut dapat membantu bagi para penyusun laporan keuangan menerapkan SAP dan SPI yang memadai.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan selama satu periode harus disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan *output* atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu (Apriansyah *et al.*, 2020). Laporan keuangan akan memiliki kualitas tinggi apabila persyaratan kualitatif laporan keuangan telah terpenuhi yaitu memenuhi kriteria relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, 2010). Selain SAP, Sistem Pengendalian Intern yang dimiliki oleh instansi juga dapat mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan oleh BPK pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu enam (6) tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019 adalah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Humas Lombok Barat, 2020). Namun, Kepala BPK RI Perwakilan NTB yakni Hery Purwanto menyampaikan terkait audit atas selesainya LKPD untuk Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019 bahwa masih terdapat catatan dan temuan (BPKAD Lombok Barat, 2020). Selain temuan tersebut, terjadinya pandemi Covid-19 menimbulkan diterbitkannya berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran telah dilakukan oleh pemerintah (Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19, 2020). Dengan adanya beberapa kebijakan baru terkait Covid-19 menyebabkan beberapa perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, Sistem pengendalian internal yang memadai juga diperlukan terlebih di masa pandemi covid-19. Kondisi covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi APBN/APBD pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir periode akan memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Shofa, 2020).

Penelitian tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Pebriani (2019) menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Hendri & Erinis (2020) yang memberikan hasil bahwa Standar Akuntansi Pemerintah memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et al.* (2020) yang menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga, terdapat ketidakkonsistenan penelitian terkait pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Adanya ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga mendorong peneliti untuk menambahkan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai variabel moderasi. Kondisi pandemi covid-19

menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk peraturan dan kebijakan pemerintah. Penelitian oleh Rabbani (2020) tentang *refocusing* menyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan publik dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah. Penelitian tentang *refocusing* dan realokasi anggaran juga diteliti oleh Junaidi *et al.* (2020) menyatakan bahwa dengan adanya *refocusing* anggaran akan menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah sehingga Inpres tersebut diperkuat dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait *refocusing* dan realokasi anggaran harus sesuai dengan standar yang berlaku dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dimana dalam pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan secara tepat sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang membahas sistem pengendalian *intern* yang dilakukan oleh Rinie *et al.* (2019) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2019) dimana memberikan hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiawan & Purnomo (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya ketidakkonsistenan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menganalisis kembali variabel sistem pengendalian *intern* dengan memasukkan variabel moderasi yakni *refocusing* dan realokasi anggaran.

Penelitian oleh Nursewan (2015), Faishol & Lamongan (2016), Rinie *et al.* (2019), Idawati & Eleonora (2020), Indrayani & Widiastuti (2020), Lestari & Dewi (2020), menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas hanya dapat diukur apabila laporan keuangan tersebut memiliki nilai yang memadai. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori kepatuhan dimana semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pada suatu organisasi akan meminimalisir tingkat kesalahan dalam pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan memiliki kualitas yang memadai. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintah (SAP) dibuat oleh badan standar akuntansi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP 71 tahun 2010 merupakan acuan dari pembuatan standar oleh badan pembuat standar dalam hal ini akuntansi pemerintah. Namun, pada saat ini, Indonesia dan Negara-negara yang berada di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Hasil penelitian oleh Latifah (2015), Langenre (2019), Sari & Fadli (2019), Pebriani (2019) dan Hendri & Erinos (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, hasil penelitian oleh Fikri *et al.* (2016) dan Apriansyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ketidakkonsistenan penelitian terdahulu tersebut

menjadi alasan agar menambahkan suatu variabel moderasi yaitu variabel *refocusing* agar dapat memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh Rabbani (2020) tentang *refocusing* menyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan publik dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait *refocusing* harus sesuai dengan standar yang berlaku dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dimana dalam pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan secara tepat sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kajian tentang penerapan kebijakan *refocusing* sejalan dengan teori stewardship yaitu lebih mementingkan pada tujuan dari organisasi. Sehingga, hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3: *Refocusing* memperkuat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan berupa *refocusing* kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19, dimana peraturan tersebut memberikan dampak bagi sistem pengendalian internal masing-masing organisasi. *refocusing* kegiatan yang di khususkan untuk penanganan Covid-19 yang tentunya berkaitan dengan sejumlah anggaran akan membutuhkan suatu system pengendalian yang memadai, agar kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 tersebut tidak terhambat. Wabah covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan tidak hanya di instansi pemerintah, tapi berdampak diseluruh dunia.

Hasil penelitian oleh Nursewan (2015), Surastiani & Handayani (2015), Idawati & Eleonora (2020), Mulia (2019), Pebriani (2019), Rinie *et al.* (2019), Lestari & Dewi (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, ada beberapa penelitian seperti Budiawan & Purnomo (2014), Pasha (2018), dan Tullah *et al.* (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. ketidakkonsistenan penelitian tersebut menyebabkan perlu dimasukkan variabel moderasi agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah *refocusing*.

Penelitian tentang *refocusing* oleh Junaidi *et al.* (2020) menyatakan bahwa penerapan kebijakan *refocusing* yang lemah akan menimbulkan tindakan kecurangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan patuhnya pemerintah daerah akan kebijakan *refocusing* akan dapat meminimalisir tindakan kecurangan terhadap anggaran yang difokuskan pada penanganan penyebaran pandemi Covid-19. Penelitian tersebut sejalan dengan teori kepatuhan yakni dalam hal kepatuhan pada kebijakan yang terdapat dalam organisasi. Semakin baik penerapan kebijakan *refocusing* dalam penanganan pandemi Covid-19, akan meminimalisir tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan sehingga akan menjadikan laporan keuangan menjadi berkualitas. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H4 : *Refocusing* memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menciptakan pelaksanaan kegiatan realokasi anggaran dimana hal tersebut difokuskan untuk anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran lainnya yang berhubungan dengan penanganan penyebaran Covid-19. Dengan dikeluarkannya peraturan realokasi anggaran tersebut menyebabkan perubahan pada standar

akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Perubahan standar tersebut akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Hendri & Erinos (2020) dan Rohman *et al.* (2020) menemukan hasil bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et al.* (2020) menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, maka pada penelitian ini menambah variabel moderasi yaitu realokasi anggaran dengan harapan variabel moderasi tersebut dapat memperkuat pengaruh dari standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang realokasi anggaran oleh Sudaryanto (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan realokasi APBD Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan peraturan terkait kebijakan realokasi anggaran pada APBD tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Dengan berjalannya penerapan peraturan yang mengatur realokasi anggaran akan menyebabkan perubahan pada pelaporan keuangan, namun jika pemerintah dapat mematuhi aturan dari standar tersebut maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan anggaran mendatang. Selain itu, hal ini sejalan dengan teori penatalayanan (*stewardship theory*) yakni peran pemerintah sebagai agen yang dituntut agar selalu mengedepankan tujuan organisasi, yaitu dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan kebijakan realokasi anggaran. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H5 : Realokasi anggaran memperkuat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

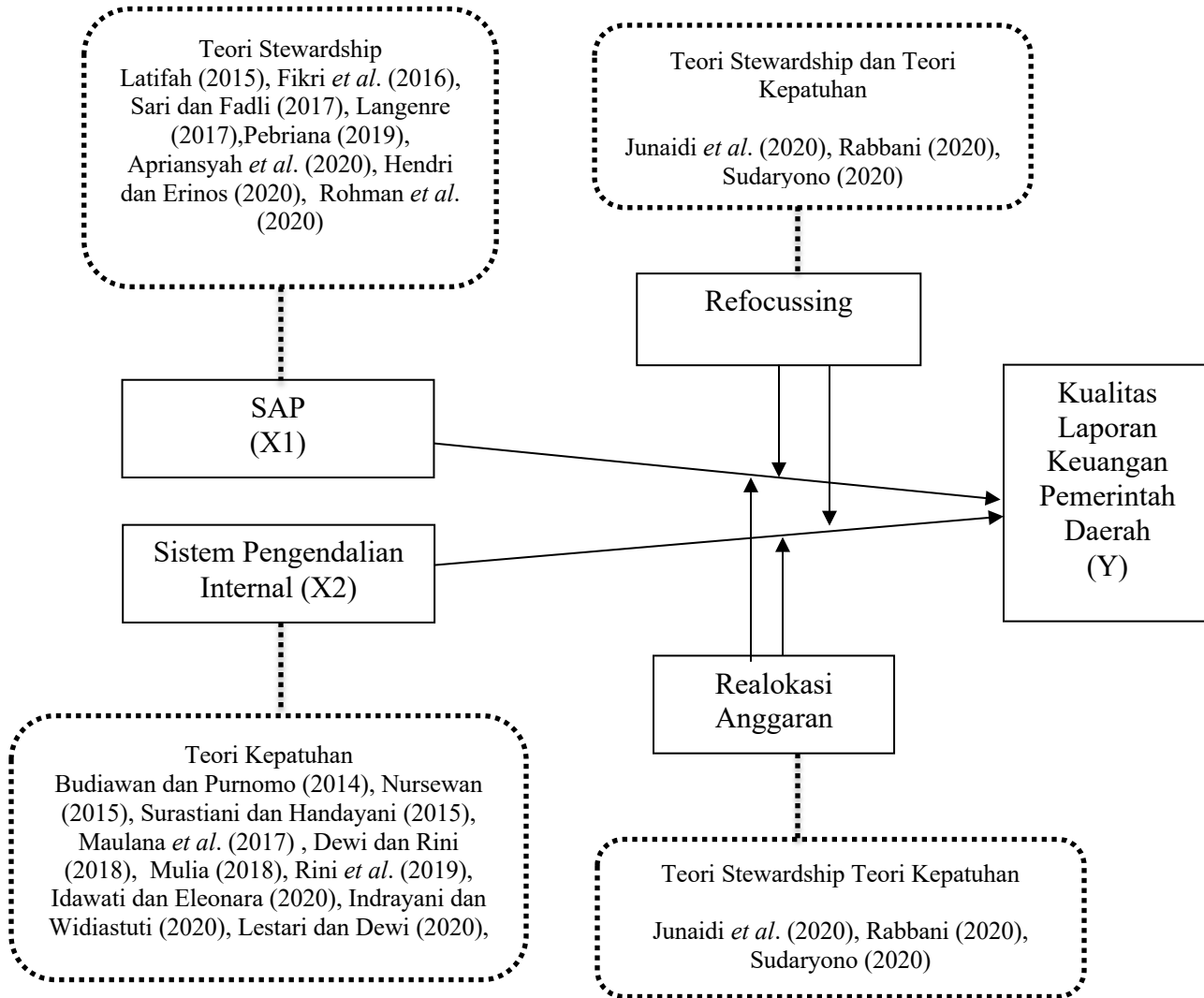
Sistem pengendalian internal merupakan salah satu kriteria yang akan mempengaruhi terciptanya kualitas laporan keuangan. Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, maka diharapkan hasil salah saji yang bersifat material pada laporan keuangan dapat diminimalisir. Namun, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan seperti Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menyebabkan terciptanya kebijakan realokasi anggaran yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19. Nominal anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran Covid-19 cukup tinggi, agar penyebaran virus tersebut tidak meluas sehingga hal tersebut memerlukan sebuah sistem pengendalian internal agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan dikeluarkannya peraturan tentang realokasi anggaran.

Penelitian tentang sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan oleh Surastiani & Handayani (2015) dan Mulia (2019) menemukan terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pasha (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia *et al.* (2020) tentang pengalokasian anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa kegiatan realokasi anggaran diterapkan guna memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja atas belanja tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengharuskan penggunaan klasifikasi akun belanja khusus, serta pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan dampak Covid-19 secara memadai, baik dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa maupun laporan pendukung laporan keuangan. Sejalan dengan teori kepatuhan dimana teori ini

memandang seseorang yang berada dalam organisasi dituntut agar mematuhi kebijakan dari standar yang telah diterapkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H6 : Realokasi anggaran memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 2.1. Rerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah eksplanatori dimana bertujuan untuk menganalisis hubungan yang dimiliki oleh satu variabel dengan variabel lain. Atau dengan kata lain, jenis penelitian ini bertujuan dalam menganalisis bagaimana pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya. Populasi penelitian adalah pegawai pada bagian akuntansi pada 43 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Adapun sampel penelitian berjumlah 129 responden dengan kriteria yakni pertama menjabat sebagai pegawai penatausahaan keuangan; kedua, menjabat sebagai bendahara; dan menjabat sebagai staf keuangan.

Alat analisis data menggunakan uji interaksi. Terdapat lima (5) variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : (1) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) selaku variabel independen; (2) Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) sebagai variabel independen; (3) *Refocusing* sebagai variabel moderasi; dan (4) Realokasi Anggaran sebagai variabel moderasi. Variabel kualitas laporan keuangan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + \beta_4 Z_2 + \varepsilon \quad (2)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + \beta_4 Z_2 + \beta_5 X_1 Z_1 + \beta_6 X_2 Z_1 + \beta_7 X_1 Z_2 + \beta_8 X_2 Z_2 + \varepsilon \quad (3)$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

X₁ = Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

X₂ = Sistem Pengendalian Internal

Z₁ = *Refocusing*

Z₂ = Realokasi Anggaran

α = konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika X = 0

β = arah koefisien regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X, atau Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independensi. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan

ε = *error*

PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 43 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dimana OPD yang dimaksud telah melakukan kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran pada tahun 2020. Berdasarkan hasil purposive sampling maka diperoleh sampel penelitian berjumlah 129 responden yang terdiri dari tiga pegawai di bagian akuntansi yang bertindak sebagai penyusun laporan keuangan. Tingkat pengembalian kuesioner terhadap 129 responden adalah sebesar 117 kuesioner.

Tabel di bawah ini menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (H1) dan Sistem Pengendalian *Intern* (H2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berikut disajikan tabel hasil regresi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian *Intern* penelitian terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 1. Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusi	129
Kuesioner yang tidak kembali	12
Kuesioner yang kembali	117
Tingkat pengembalian kuesioner	90,6%

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pengujian validitas pada setiap pertanyaan kuesioner menggunakan analisis item yakni dengan melakukan korelasi dari masing-masing skor butir item pertanyaan dengan skor total. Kriteria yang harus dipenuhi adalah dengan membandingkan nilai r hitung dengan r Tabel pada *degree of freedom* (df) = n-2. Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item pertanyaan di setiap variabel adalah valid.

Untuk mengukur tingkat realibilitas atau kehandalan suatu kuesioner adalah apabila jawaban yang diberikan oleh responden terhadap suatu pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini mengukur korelasi antar jawaban dari tiap pernyataan yakni dengan melihat *Cronbach Alpha* > 0,70.

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

	Variabel	Koefisien Regresi	t test	Signifikansi	Keterangan
Model 1	SAP	0.345	5.793	0.000	Diterima
	SPI	0.249	2.503	0.014	Diterima
	F test = 22.549 R Square = 0.283 Adjusted R Square = 0.271				
Model 2	SAP	0.282	4.442	0.000	Diterima
	SPI	0.220	2.264	0.026	Diterima
	<i>Refocusing</i>	0.282	1.870	0.064	Ditolak
	Realokasi Anggaran	0.154	1.147	0.254	Ditolak
	F test = 14.384 R Square = 0.339 Adjusted R Square = 0.316				
Model 3	SAP	-0.798	-1.102	0.273	Ditolak
	SPI	0.890	0.649	0.518	Ditolak
	<i>Refocusing</i>	1.195	0.557	0.579	Ditolak
	Realokasi Anggaran	-1.838	-1.047	0.297	Ditolak
	SAP * <i>Refocusing</i>	-0.027	-1.220	0.225	Ditolak
	SPI * <i>Refocusing</i>	0.013	0.282	0.779	Ditolak
	SAP * Realokasi Anggaran	0.054	2.436	0.016	Diterima
	SPI * Realokasi Anggaran	-0.029	-0.704	0.483	Ditolak
F test = 8,074 R Square = 0.37,4 Adjusted R Square = 0.32,8					

Sumber: Lampiran 8 (2021)

Pada dasarnya, uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 98). Apabila uji F, P *Value* menunjukkan $\alpha < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut layak digunakan.

Pengujian hipotesis pertama penelitian menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Koefisien regresi variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 0.345. Artinya semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0.345 atau sebesar 34,5% tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Jika dilihat dari tingkat signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,005$ yang berarti bahwa variabel SAP mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara positif dan signifikan.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian *Intern* (X2) 0.249. Hal ini berarti bahwa semakin baik Sistem Pengendalian *Intern*, akan

meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0.249 atau sebesar 24,9 % tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Jika dilihat dari tingkat signifikansi, diperoleh sebesar 0,014 lebih besar dari 0,005, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak atau tidak mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kegiatan *refocusing* anggaran memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Nilai statistik (t hitung) *Refocusing* sebesar -1,220 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel dengan taraf signifikansi 5% yakni 1,890. Selain itu, dapat dilihat dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0.225, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga pada persamaan ketiga bagian pengujian interaksi menyatakan bahwa kegiatan *refocusing* anggaran tidak memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan *refocusing* anggaran memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Nilai statistik (t hitung) *Refocusing* sebesar 0.282 dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel dengan taraf signifikansi 5% yakni 1,890. Selain itu, dapat dilihat dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0.779, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis keempat pada persamaan empat bagian dua yakni terdapat pengujian interaksi menyatakan bahwa kegiatan *refocusing* anggaran tidak memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan realokasi anggaran memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Nilai statistik (t hitung) Realokasi Anggaran sebesar 2,436 dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel dengan taraf signifikansi 5% yakni 1,890. Selain itu, dapat dilihat dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0.016 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis kelima pada persamaan kelima bagian pengujian interaksi menyatakan bahwa kegiatan realokasi anggaran memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan realokasi anggaran memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Nilai statistik (t hitung) Realokasi Anggaran sebesar -0.704 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel dengan taraf signifikansi 5% yakni 1,890. Selain itu, dapat dilihat dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0.483 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis keenam pada persamaan keenam bagian pengujian interaksi menyatakan bahwa kegiatan realokasi anggaran tidak memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini adalah penelitian berjenis kuantitatif dengan menggunakan SPSS 23.0 sebagai alat statistik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan; kedua, Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan; ketiga, *Refocusing* tidak memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan; keempat, *Refocusing* tidak memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan; kelima Realokasi Anggaran memperkuat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan; dan, keenam, Realokasi Anggaran tidak memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Saran bagi penelitian mendatang adalah menambah variabel penelitian seperti teknologi informasi, pengawasan sistem keuangan, opini audit, kemampuan sumber daya manusia dan perencanaan anggaran. Kemudian, menggunakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan serta implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, menambahkan jumlah lokasi penelitian, misalnya perbandingan kualitas laporan keuangan dengan membandingkan dua organisasi perangkat daerah yang berada di kabupaten atau provinsi. Dan terakhir, diharapkan alat pengumpulan data tidak hanya berupa kuesioner, namun dengan menambahkan metode wawancara agar menjadikan hasil penelitian yang semakin beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alas, R., Übius, U., Lorents, P., & Matsak, E. (2017). Corporate Social Responsibility In European And Asian Countries. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI) UNSRAT Vol. 4 No. 1*
- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *JAR: Jambi Accounting Review*, 1(1), 44–62. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/10944>
- Asyiyhatul Latifah. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 15.
- Aulia, A. R., & Yulianti, A. L. (2017). Pengaruh City Branding “a Land of Harmony” Terhadap Minat Berkunjung Dan Keputusan Berkunjung Ke Puncak, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 1,2, 3(3), 70. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp67>
- Barat, BPKAD Lombok. (2020). *LKPD TAHUN 2019 KABUPATEN LOMBOK BARAT SELESAI DIPERIKSA*. <http://bpkad.lombokbaratkab.go.id/lkpd-tahun-2019-kabupaten-lombok-barat-selesai-diperiksa/>
- PERBUP No. 22 Tahun 2020, (2020).
- Barat, H. L. (2020). *DI TENGAH COVID-19 LOMBOK BARAT RAIH WTP KE-6 KALI*. <http://bpkad.lombokbaratkab.go.id/di-tengah-covid-19-lombok-barat-raih-wtp-ke-6-kali/>
- Barat, L. (2021). *Refocusing Anggaran di Lobar Sasar Belanja Program OPD Tak Strategis*. <https://www.suarantb.com/refocusing-anggaran-di-lobar-sasar-belanja-program-opd-tak-strategis/>
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Telaah proses *rocofusing* dan realokasi Apbd. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*, 4, 59–78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321>
- Eristanti, B. D. A., & Putra, I. N. N. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 22(38), 145–150. <http://www.ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/JEMA/article/view/212>
- Faishol, A. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Inter Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Laomngan)*. I(3),

205–212.

- Fikri, M. Al., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Undip.
- Hasdiana, H., & Hasang, I. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 1. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.562>
- Hendri, M., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/224>
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. H. Ilyas Ismail, M.Pd. (ed.); I). Gunadarma Ilmu.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020, 1 (2020).
- Permendagri 39/2020, 1 (2020).
- KMK Nomor 6 Tahun 2020, 1 (2020).
- PMK Nomor 19 Tahun 2020, 11 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 5 (2008).
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018, 121 (2018). jdih.lkpp.go.id
- Perpu RI No 1 Tahun 2020, 2019 (2019).
- Impres nomor 4 tahun 2020, 22698 (2020).
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Jeffer, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2020, 2019 Kemenkes RI 1 (2020).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, D. A. dan P. (2020). *Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 Sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional*.

- SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6/2020, 1 (2020). Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Masa Pandemi Covid-19, (2020).
- Langenre, S. S. (2019). PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur). *E Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, 5*, 97–107.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2)*, 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH, 9(1), 7*. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri Nomor 177 Tahun 2020, Nomor 382 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1 (2020). <http://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- NTB, F. (2021). Lagi, BPK Temukan Indikasi Tipu-tipu Perjadin Senilai Rp253,8 Juta di Setwan Lombok Barat. <https://www.fitrantb.org/lagi-bpk-temukan-indikasi-tipu-tipu-perjadin-senilai-rp2538-juta-di-setwan-lombok-barat/>
- Nursewan, K. (2015). *Faculty of Economics Riau University*,. 2, 1–13.
- Pasha, A. K. (2018). Pengaruh Penerapan Standar AKuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Comprehensive Physiology, 6(19)*, 387–387.
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global, 10(1)*, 55–62.
- Pratiwi, N. V., & Kusumo, B. W. (2020). Peran APIP dalam Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pengawasan, 2(2)*, 1–8.
- Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M. C. A. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate* (8 (ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Terbaru). ANDI.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.01 Tahun 2020, 1 (2020).
- Rinie, R., Pranata, V. M., & Rapina, R. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei pada Perusahaan Tekstil di Kota Bandung dan Sekitarnya). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA), 1(1)*, 15–30. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1525>
- Rohman, A., Ismaya, A., & Lestari, T. (2020). Peran Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: abdujangrohman@gmail.com Abstrak Key. *Jurnal Riset AKuntansi Tirtayasa, 05(02)*, 152–165.

- Sari, G. I., & Fadli, F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17–34. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17-34>
- Shofa, J. N. (2020). BPK Akan Periksa Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19. <https://www.beritasatu.com/nasional/655411/bpk-akan-periksa-pengelolaan-anggaran-penanganan-covid19>
- Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X.” *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akutansi*, 5(1), 235–240. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/254>
- Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian Mandiri*, 4(71), 1–25.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7, 1–11.
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2). <http://180.250.41.45/jppolicy/article/view/2446>
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>